

TRANSPORTASI MOLEK DAN KEBIJAKAN DESA: UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT DESA LEBONG TANDAI

Apsas Saputra¹, Kharis Kurnia²

^{1,2} Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Indonesia

*Korespondensi : apsas-saputra@ubb.ac.id

ABSTRAK

Aksesibilitas transportasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan desa, khususnya bagi wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Desa Lebong Tandai di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan desa dengan keterbatasan akses transportasi darat konvensional sehingga masyarakat sangat bergantung pada transportasi molek sebagai satu-satunya moda transportasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan kebijakan Pemerintah Desa Lebong Tandai dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui pengelolaan transportasi molek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis *Equity and Accessibility Framework*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur, pengaturan tarif, subsidi terbatas, dan pelibatan masyarakat. Namun demikian, tantangan masih ditemukan pada aspek kesetaraan manfaat, keterjangkauan ekonomi, serta penguatan kelembagaan transportasi desa. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi desa, optimalisasi peran BUMDes, dan kebijakan subsidi berkelanjutan guna menciptakan sistem transportasi desa yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Aksesibilitas, Kebijakan Desa, Transportasi Molek, Pembangunan Desa, Lebong Tandai

ABSTRACT

Transportation accessibility is a key prerequisite for village development, particularly in areas with difficult-to-reach geographical conditions. Lebong Tandai Village in North Bengkulu Regency is a village with limited access to conventional land transportation, so the community relies heavily on public transportation as their sole mode of transportation. This article aims to analyze the role and policies of the Lebong Tandai Village Government in improving community accessibility through public transportation management. This research uses a descriptive qualitative approach with an Equity and Accessibility Framework analysis framework. The results of the study indicate that the village government has attempted to improve accessibility through infrastructure improvements, tariff regulation, limited subsidies, and community involvement. However, challenges remain in the aspects of equality of benefits, economic affordability, and strengthening village transportation institutions. This article recommends strengthening village regulations, optimizing the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes), and sustainable subsidy policies to create an inclusive and equitable village transportation system.

Keywords: *accessibility, village policy, smart transportation, village development, Lebong Tandai.*

A. PENDAHULUAN



Gambar 1. Bentuk Moda Transportasi Molek

Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan produk layanan yang disediakan oleh pemerintah. Aksesibilitas dijadikan sebagai indikator keberhasilan dan kemudahan seseorang dalam hal ini masyarakat untuk mencapai tujuan yang berupa kombinasi antara mobilitas dan ketersediaan transportasi (Litman:2015). Aksesibilitas menjadi faktor utama dalam pembangunan desa terkhusus daerah dengan keadaan geografis terjal dan sulit diakses menggunakan kendaraan mobil dan motor. Desa Lebong Tandai menjadi salah satu desa yang sulit diakses di Provinsi Bengkulu.

Desa Lebong Tandai berada di Kabupaten Bengkulu Utara yang secara geografis masuk kedalam bagian dari Kecamatan Napal Putih. Desa Lebong Tandai merupakan desa yang tersembunyi dibalik bukit barisan. Memerlukan mental dan keberanian ketika hendak datang ke Desa Lebong Tandai. Hal tersebut karena desa ini dikelilingi hutan dan jurang yang terjal sehingga tidak ada satupun transportasi darat yang bisa melewatinya. Hanya ada

satu transportasi yang bisa masuk ke Desa Lebong Tandai, yaitu "Molek". Molek merupakan satu-satunya transportasi yang digunakan warga Desa Lebong Tandai. Transportasi ini seperti kereta api yang berjalan diatas rel. Membutuhkan waktu enam jam perjalanan dengan menggunakan molek untuk sampai di Desa Lebong Tandai. Titik stasiun molek berada di Pd Bakil Kecamatan Napal Putih.

Dahulunya transportasi molek sering digunakan oleh masyarakat penambang emas di Desa Lebong Tandai. Pada zaman kolonial Belanda, Desa Lebong Tandai menjadi batavia kecil dengan lautan emas. Banyak negara eropa rebutan untuk menguasai Desa Lebong Tandai. Bahkan Desa Lebong Tandai menjadi penyumbang emas untuk diletakan di monumen nasional (Monas). Akan tetapi, semua itu hanya sebuah sejarah yang harus dikenangkan. Saat ini Desa Lebong Tandai menjadi desa yang ditinggalkan karena kesulitan akses untuk mengunjungi desa tersebut. Minimnya infrastuktur sehingga masyarakat Desa Lebong Tandai bergantung pada akses transportasi molek. Molek dijadikan sebagai alat transportasi utama dan satu-satunya. Akan tetapi, molek juga sering digunakan sebagai alat logistik pemerintah desa seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan sampai kebutuhan logistik pemilu. Sebagai satu-satunya alat untuk menuju desa, Molek harus terus bertransformasi demi kepentingan masyarakat. Transformasi dari segala ranah baik alat angkut masyarakat ataupun kepentingan pemerintah desa (Dwiyanto, 2012.)

Keterbatasan infrastruktur transportasi tersebut menyebabkan ketergantungan masyarakat pada molek sangat tinggi. Di sisi lain, ketergantungan masyarakat pada molek juga menimbulkan berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas angkut, keamanan perjalanan, waktu tempuh yang lama serta biaya perawatan infrastruktur rel molek menjadi isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa. Sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi, memperbaiki sarana pendukung, dan memperluas aksesibilitas masyarakat.

Berdasarkan kerangka pembangunan desa bahwa eksistensi transportasi molek memerlukan dukungan dari pemerintah desa terutama kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang mampu memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, dapat mengakses layanan transportasi secara setara dan terjangkau. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan *Equity and Accessibility Framework* untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa berupaya meningkatkan aksesibilitas transportasi di Desa Lebong Tandai karena sejauh ini belum ada kebijakan secara resmi yang mengatur mengenai transportasi molek.

Framework ini menekankan dua aspek utama: kesetaraan (*equity*) dan keterjangkauan akses (*accessibility*). Kesetaraan berkaitan dengan pemerataan kesempatan dan manfaat layanan transportasi, sedangkan keterjangkauan akses mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial-institusional, dan informasi. Artikel

ini bertujuan menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menjamin distribusi manfaat transportasi molek, sekaligus meningkatkan keterhubungan masyarakat dengan layanan publik dasar.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan berbagai metode untuk melakukan pemahaman lebih mendalam berdasarkan masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell: 2010). Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada gejala-gejala sosial yang ada Ketika menjalani proses penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Lebong Tandai selaku pengelola transportasi Molek.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian. Data primer yang diterima secara langsung oleh peneliti gunakan pemberkuat hasil penelitian. Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti Ketika melakukan proses tanya jawab yang berupa wawancara pada narasumber, yaitu pemerintah Desa Lebong Tandai, masyarakat dan BUMDes Desa Tanjung Tandai. Selain itu, data sekunder dapat dikatakan sebagai data tambahan atau data yang didapatkan melalui sumber ilmu lain. Data sekunder tersebut sebagai penunjang bagi data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen dari pemerintah desa dan berbagai video dokumenter.

Proses pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketika berada pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan

awal mengenai penelitian. Mengamati dapat dilakukan secara langsung dan merasakan bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya dilapangan mengenai aksesibilitas transportasi molek di Desa Lebong Tandai. Kegiatan observasi dapat dikumpulkan menjadi data berdasarkan temuan yang didapatkan dilapangan.

Tahap kedua setelah observasi, yaitu wawancara. Peneliti melakukan proses wawancara berdasarkan pedoman yang telah disusun. Kegiatan wawancara berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan transportasi molek di Desa Lebong Tandai. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Lebong Tandai, perangkat desa yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan transportasi, pengelola atau pengurus BUMDes, operator transportasi molek, serta masyarakat pengguna transportasi molek, termasuk kelompok pelajar, pedagang, dan warga yang secara rutin memanfaatkan layanan tersebut.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles, M. B., Huberman A, 2014). Kriteria tersebut meliputi: (1) memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan pengelolaan transportasi molek; (2) terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, atau pemanfaatan transportasi molek; dan (3) mampu memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan

sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan spesifik terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui transportasi molek.

Tahap ketiga berupa studi pustaka. Studi pustaka berupa pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan cara membaca buku, artikel dan laporan peneliti. Tujuan studi pustaka untuk memperkuat data yang didapatkan setelah disandingkan dengan data yang didapatkan melalui studi pustaka. Tahap ketiga berupa dokumentasi. Tahap ini dilakukan beriringan dengan observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat menjadi penguat data saat dibutuhkan dalam lampiran penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aksesibilitas dalam Pembangunan Desa

Aksesibilitas dalam pembangunan desa berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat desa untuk menjangkau sumber daya, pasar, layanan publik, dan pusat-pusat aktivitas sosial. Peningkatan aksesibilitas diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menurunkan kesenjangan wilayah, serta memperkuat integrasi sosial. Dalam perspektif administrasi publik, aksesibilitas juga menjadi indikator kualitas pelayanan publik. Layanan publik yang baik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

2. Equity and Accessibility Framework

Equity and Accessibility Framework menekankan dua dimensi utama dalam kebijakan transportasi, yaitu kesetaraan (equity) dan keterjangkauan (accessibility).

Dimensi equity mencakup pemerataan kesempatan, pemerataan manfaat, dan pemerataan distribusi sumber daya. Sementara itu, dimensi accessibility mencakup akses fisik, akses ekonomi, akses sosial-institusional, dan akses informasi. Kerangka ini relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan transportasi desa karena mampu menilai sejauh mana kebijakan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menjamin keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

3. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Transportasi Molek

Pemerintah Desa Lebong Tandai menyadari bahwa keterbatasan akses transportasi merupakan hambatan utama pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa merumuskan sejumlah kebijakan dan program untuk menunjang keberlangsungan transportasi molek. Pertama, pemanfaatan Dana Desa diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung molek, seperti perbaikan rel, jembatan kecil, dan jalan lingkungan yang terhubung dengan jalur molek. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi transportasi molek sebagai sarana utama mobilitas. Pemanfaatan dana daerah atau desa sudah menjadi keharusan dalam hal perkembangan dan kemajuan suatu desa (Mardiasmo, 2018).

Kedua, pemerintah desa melakukan pengaturan tarif dan mekanisme layanan melalui musyawarah desa. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah tarif yang terlalu tinggi dan membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, pemerintah desa menyediakan subsidi transportasi terbatas, khususnya bagi pelajar, kelompok

rentan, dan kegiatan sosial prioritas. Subsidi ini meskipun belum bersifat permanen, menunjukkan keberpihakan kebijakan terhadap kelompok yang membutuhkan.

Keempat, pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalur molek dilakukan melalui gotong royong. Pola ini tidak hanya mengurangi beban anggaran desa, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur transportasi. Kelima, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan operator molek untuk memastikan aspek keselamatan, kepastian rute, dan fungsi layanan transportasi tetap berjalan dengan baik.

Analisis Kebijakan Menggunakan Equity and Accessibility Framework



Gambar 2. Rel Kereta Transportasi Molek

a. Dimensi Kesetaraan (Equity)

Pendekatan *equity* dalam analisis kebijakan transportasi molek menekankan pada sejauh mana kebijakan desa mampu memberikan keadilan akses mobilitas bagi seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan peraturan menerti desa, Pembangunan daerah tertinggal nomor 13 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa bahwa setiap pemerintah desa berhak memiliki keuangan untuk mengelola Pembangunan di desa terutama akses jalan menuju desa. Kebijakan transportasi molek sudah

seharusnya menjadi perhatian penting dan perlu diperbaiki dengan dana desa. Kebijakan transportasi yang berorientasi pada *equity* tidak memandang masyarakat sebagai kelompok homogen, melainkan memperhitungkan perbedaan kemampuan ekonomi, kondisi fisik, serta lokasi tempat tinggal warga.

Dalam konteks Desa Lebong Tandai, transportasi molek memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah terisolasi, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak. Kebijakan desa yang mendukung keberlanjutan transportasi molek mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mengurangi kesenjangan akses antar wilayah dan antarkelompok sosial.

Analisis *equity* juga mencakup distribusi manfaat dan beban kebijakan. Apabila biaya transportasi molek masih relatif terjangkau dan dapat digunakan oleh mayoritas masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan berkeadilan. Sebaliknya, apabila hanya kelompok tertentu yang mampu memanfaatkan transportasi molek, maka kebijakan desa berpotensi menciptakan ketimpangan akses.

Selain itu, Dari sisi kesetaraan akses, kebijakan desa telah meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan mobilitas masyarakat. Namun, hambatan biaya masih dirasakan oleh kelompok masyarakat kurang mampu yang tidak dapat menggunakan molek secara rutin. Dalam aspek kesetaraan manfaat, petani dan pedagang memperoleh keuntungan signifikan karena distribusi hasil kebun menjadi lebih lancar. Sebaliknya, pelajar, perempuan, dan lansia masih menghadapi

keterbatasan dalam mengakses layanan molek secara konsisten. Pada aspek distribusi anggaran, alokasi Dana Desa lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, sementara alokasi untuk subsidi transportasi dan penguatan kelembagaan masih relatif terbatas.

b. Dimensi Keterjangkauan (Accessibility)

Aksesibilitas dalam kebijakan transportasi molek tidak hanya diukur dari keberadaan moda transportasi itu sendiri, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam menggunakannya secara nyata (Tamin, 2000). Dalam *Equity and Accessibility Framework*, aksesibilitas mencakup beberapa dimensi utama, yaitu geografis, ekonomi, administratif, dan sosial.

Secara geografis, transportasi molek menjadi solusi atas keterbatasan infrastruktur jalan menuju Desa Lebong Tandai. Keberadaan jalur molek memungkinkan mobilitas masyarakat meskipun kondisi medan sulit. Dari aspek ekonomi, kebijakan desa yang tidak membebani masyarakat dengan biaya tinggi menunjukkan adanya keberpihakan terhadap kemampuan ekonomi warga desa.

Dari sisi administratif, dukungan pemerintah desa dalam bentuk pengakuan, pengaturan operasional, atau alokasi anggaran desa untuk pemeliharaan jalur molek menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas. Sementara itu, dari dimensi sosial, penerimaan masyarakat terhadap transportasi molek sebagai moda utama menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal.

Akses fisik masyarakat mengalami peningkatan seiring perbaikan infrastruktur,

namun kondisi geografis ekstrem dan cuaca masih menjadi tantangan utama. Pada aspek ekonomi, tarif molek yang relatif tinggi membatasi akses kelompok ekonomi lemah. Akses sosial-institusional belum sepenuhnya optimal karena belum adanya Peraturan Desa atau Standar Operasional Prosedur tertulis yang mengatur standar keselamatan dan layanan. Sementara itu, akses informasi masih bersifat informal dan disampaikan secara lisan, sehingga kurang efektif.

c. Transportasi Molek sebagai Instrumen Kebijakan Aksesibilitas Desa

Transportasi molek merupakan moda transportasi utama yang digunakan masyarakat Desa Lebong Tandai untuk menjangkau pusat pelayanan publik, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi geografis desa yang relatif terpencil dan keterbatasan infrastruktur jalan menjadikan transportasi molek bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan bagian penting dari kebijakan desa dalam menjamin keterhubungan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan transportasi molek dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan non-formal yang diakui dan difasilitasi oleh pemerintah desa untuk menjawab keterbatasan aksesibilitas. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan transportasi molek perlu dilakukan tidak hanya dari aspek teknis transportasi, tetapi juga dari sisi keadilan (*equity*) dan kemudahan akses (*accessibility*) bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Lebong Tandai.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya

penyusunan Peraturan Desa tentang transportasi desa. Kedua, perlunya subsidi transportasi berkelanjutan bagi kelompok rentan. Ketiga, penguatan peran BUMDes dalam pengelolaan transportasi molek agar lebih profesional dan berkelanjutan. Keempat, pemanfaatan teknologi sederhana untuk penyediaan informasi layanan transportasi. Kelima, perlunya sinergi lintas pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Desa Lebong Tandai membuat berbagai kebijakan dalam menunjang transportasi molek. Pemerintah desa berfokus pada perbaikan rel dan jembatan untuk moda transportasi molek. Pemerintah desa menggunakan beberapa instrumen kebijakan untuk mendukung layanan transportasi molek, antara lain:

1. Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan serta jalan produksi yang menjadi jalur utama molek.
2. Pengaturan tarif dan mekanisme layanan melalui musyawarah desa atau Peraturan Desa untuk mencegah tarif yang membebani masyarakat miskin.
3. Program subsidi transportasi, terutama untuk pelajar, masyarakat rentan, serta kegiatan sosial yang dianggap prioritas.
4. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalur transportasi (gotong royong) sehingga beban perawatan tidak sepenuhnya ditanggung desa.
5. Kerja sama dengan operator molek guna memastikan keselamatan, kepastian rute, dan kejelasan fungsi layanan.

d. Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Transportasi yang Adil dan Aksesibel



Gambar 3. Pemerintah Desa Lebong Tandai memperbaiki kondisi rel Molek

Pemerintah Desa Lebong Tandai memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan transportasi molek. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek regulatif, tetapi juga pada fungsi fasilitatif dan koordinatif. Pemerintah desa berperan dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang ada, serta memastikan bahwa kebijakan transportasi molek tetap berjalan secara berkelanjutan (Sutiyo, & Maharjan, 2017).

Dalam kerangka *Equity and Accessibility Framework*, peran pemerintah desa dapat dianalisis melalui tingkat responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang responsif ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal, serta komitmen pemerintah desa untuk menjaga keterjangkauan dan keamanan transportasi molek.

e. Dampak Kebijakan Transportasi Molek terhadap Pembangunan dan Keadilan Sosial Desa

Kebijakan transportasi molek memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan Desa Lebong Tandai, khususnya dalam meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan dasar dan aktivitas ekonomi. Transportasi yang adil dan aksesibel berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan isolasi wilayah, serta penguatan integrasi sosial.

Dalam jangka panjang, kebijakan transportasi molek yang dianalisis melalui *Equity and Accessibility Framework* menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada keadilan sosial. Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana pemerintah desa dapat mengembangkan solusi lokal yang kontekstual untuk menjawab tantangan aksesibilitas dan ketimpangan wilayah.

f. Implikasi Analisis *Equity and Accessibility Framework* terhadap Kebijakan Desa

Hasil analisis menggunakan *Equity and Accessibility Framework* memberikan implikasi bahwa kebijakan desa di bidang transportasi perlu dirancang secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa kebijakan transportasi molek tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.

Implikasi kebijakan ini mencakup perlunya penguatan regulasi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta integrasi kebijakan transportasi dengan program pembangunan desa lainnya. Dengan demikian, transportasi molek dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang berorientasi pada *equity* dan *accessibility*.

D. KESIMPULAN

Transportasi molek merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial dan

ekonomi masyarakat Desa Lebong Tandai. Melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa, aksesibilitas masyarakat mengalami peningkatan, terutama dari sisi perbaikan infrastruktur dan pengaturan layanan transportasi lokal. Namun, berdasarkan analisis menggunakan Equity and Accessibility Framework, masih terdapat tantangan pada aspek kesetaraan manfaat dan keterjangkauan layanan bagi seluruh kelompok masyarakat. Penguatan kelembagaan, kebijakan tarif yang adil, serta peningkatan peran BUMDes menjadi strategi penting untuk menciptakan layanan transportasi yang benar-benar inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya pemerintah desa yang lebih terstruktur dan partisipatif akan meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta memperkuat pembangunan Desa Lebong Tandai di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2012). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Litman, T. (2015). *Evaluating accessibility for transportation planning*. Victoria: Victoria Transport Policy Institute.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan pemodelan transportasi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.